



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HREE SHANTY BAYU ARDI PERBAWA
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 400323

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.585.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/132 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/352 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/81 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 80000 m2/80000 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/243 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.860.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/127 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 206.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI KR 150 K Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.5 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 35.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	548.575.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	112.767.829
F. HARTA LAINNYA	Rp.	633.963.672
Sub Total	Rp.	13.556.306.501
III. HUTANG	Rp.	250.000.002
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.306.306.499

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.